

STRATEGI MITIGASI BENCANA ALAM NONSTRUKTURAL DI GUNUNG BAWAKARAENG DALAM PERSPEKTIF ADAPTIVE GOVERNANCE

*Natural Disaster Mitigation Nonstructural Strategy At Mount Bawakaraeng
On Adaptive Governance Perspective*

Zarni Adia Purna, Muh.Akmal Ibrahim, Baharuddin

Jurusan Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar

E-Mail: adihexatanic@rocketmail.com

ABSTRAK

Mitigasi bencana merupakan tindakan bersama sebagai bagian penting dari paradigma penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stakeholder dalam aktivitas mitigasi bencana alam di Gunung Bawakaraeng dan dimensi adaptive governance dari motif stakeholder, struktur serta jaringan dalam mitigasi bencana alam di Gunung Bawakaraeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam di Gunung Bawakaraeng dan pihak-pihak yang memiliki konsentrasi kegiatan yang rutin di Gunung Bawakaraeng. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwastakeholder dalam mitigasi bencana alam di Gunung Bawakaraeng terdiri atas sektor sipil, sektor privat dan sektor publik. Pemerintah sebagai leading sector belum sepenuhnya memiliki sikap adaptif membaca isu strategis dalam mitigasi bencana alam di Gunung Bawakaraeng.

Kata kunci: Multistakeholders, Penanggulangan Bencana, Adaptive Governance

ABSTRACT

Disaster mitigation is collective act that important part of disaster management paradigm. This research aims to determine the stakeholder in natural disaster mitigation context on mount Bawakaraeng and Governance Adaptive Dimension from stakeholder motive, structure and network in natural disaster mitigation on mount Bawakaraeng. This research used qualitative approach. The data obtained through observation, interview and documentation towards information which directly involved in the processing of natural resources on mount Bawakaraeng and the parties who have routine activity concentration at mount Bawakaraeng. The analysis process of data covered data reduction, data presentation and drawing conclusion. The result indicate that the stakeholders in natural disaster mitigation on mount Bawakaraeng consisted of civil sector, private sector and public sector. Government as a leading sector does not fully have adaptive attitude to read the strategy issues in natural disaster mitigation on mount Bawakaraeng

Keywords: Multistakeholders, Disaster Management, Adaptive Governance

PENDAHULUAN

Mitigasi bencana telah lama menjadi konsen kajian multisektoral di berbagai Negara tetapi di Indonesia yang secara geografis memiliki tingkat kerentanan lingkungan serta statistik bencana yang terbiang cukup tinggi, Undang-Undang tentang kebencanaan justru baru keluar pada tahun 2007 yang ditandai dengan keluarnya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Telah jelas diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang kemudian termanifestasikan dalam banyak dimensi kemasyarakatan termasuk perlindungan dari kerugian akibat bencana, baik itu berupa bencana

yang langsung merugikan manusia ataupun bencana lingkungan yang dikemudian hari akan memberi daya destruktif bagi keberlangsungan hidup masyarakat (Musdah, 2014). Oleh karena itu, dalam penanggulangan bencana, mitigasi bencana memegang peranan yang sangat vital sebab jika ancaman bahaya berhasil dicegah maka tidak perlu ada lagi proses-proses manajemen bencana berkelanjutan (Nurjanah dkk., 2012).

Dalam hubungannya dengan administrasi publik, apapun bentuknya, bencana selalu membawa derita, menimbulkan korban harta dan nyawa, menghancurkan tatanan sosio ekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis dan banyak hal lain yang mengindikasikan kerentanan diri sebagai sebuah bangsa (Thoha, 2011). Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat, menjadikannya sebagai *common and public problem* yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik. Sebagai pola tindak intervensi yang kolektif, administrasi publik dituntut mampu memainkan peran yang menjadi tanggung jawabnya dalam manajemen bencana. Pertama, administrasi publik turut bermain secara praktis maupun normatif-regulatif (melalui instrumen kebijakan) dalam berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya; kedua, administrasi publik bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap situasi yang menciptakan kerugian pada masyarakat; ketiga, administrasi publik bertanggung jawab langsung untuk memberikan perlindungan, penanganan dan melakukan pencegahan atas berbagai kemungkinan dampak bencana kepada masyarakat (Ulum, 2008).

Kerentanan terhadap potensi bencana yang sudah mulai ditampakkan oleh Gunung Bawakaraeng lambat laun akan memberikan dampak negatif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya, terlebih lagi dengan fakta bahwa kerusakan lingkungan telah tercermin dari beragam tanda-tanda vital pegunungan yang mulai semakin melemah. Longsoran kaldera pada gunung Bawakaraeng pada tahun 2004 hanya merupakan awal dan sebagai penanda kerapuhan lingkungan terlebih lagi jika melihat semakin tingginya aktivitas ekonomi dan sosial disekitar gunung tersebut.

Kondisi kerentanan ini diperparah dengan langkah mitigasi yang tidak sistematis dan

cenderung menunggu kejadian bencana terjadi, tingginya aktivitas ekonomi tanpa perencanaan mitigasi yang baik, pola pembangunan yang mengesampingkan keseimbangan ekosistem serta ketidakjelasan aktor-aktor yang hendaknya terlibat aktif dalam perlindungan sumberdaya alam sebagai salah satu bagian dari mitigasi nonstruktural (Susanto, 2006). Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah kembali pada fungsinya sebagai *leading sector* bagi banyak kepentingan yang berkenaan dengan eksistensi gunung Bawakaraeng. Terlebih lagi dalam perspektif kajian total disaster risk management yang menitik beratkan strategi mitigasi pada pengintegrasian hubungan relasi antar multistakeholder dan melibatkan peranan nyata masyarakat yang tinggal di wilayah rentan bencana.

Koordinasi dan hubungan relasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Koordinasi yang terjalin apik pun akan membagi rata beban respons, rehabilitasi dan rekonstruksi ketika darurat bencana melanda dimana hal ini dinilai belum menjadi perhatian penuh dari pemerintah sebagai *leading sector* (Schwab dkk., 2007).

Selanjutnya, dalam term *governance*, pendekatan *adaptive governance* mulai digalakkan dalam mengkaji tentang fungsi dan peran-peran strategis aktor dalam sebuah concern terhadap objek kajian multistakeholders. Seperti yang dikemukakan oleh Berkes & Folke (2008), yang menekankan prinsip *adaptive* pada kemampuan pemerintah sebagai *leading sector* dalam membaca dan mengkonsolidasikan motif stakeholders dalam upaya untuk pengelolaan bersama sebuah objek dengan membangun platform kerja bersama yang pada akhirnya membentuk struktur dan jaringan kolektif sebagai wahan pertukaran sumber daya masing masing aktor yang berkepentingan. Pengakomodasian motif dan isu dalam membangun struktur dan jaringan menentukan tingkat *adaptive leading sector*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stakeholder dalam aktivitas mitigasi bencana alam di gunung Bawakaraeng dan dimensi *adaptive governance* dari motif stakeholder, struktur serta jaringan dalam mitigasi bencana alam di Gunung Bawakaraeng.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan maksud mencoba untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat sekarang (Noor., 2012). Alasan utama yang menjadi dasar adalah adaptive governance menekankan pada proses-proses kolaboratif dari berbagai lintas stakeholder.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa. Pemilihan Gunung Bawakaraeng sebagai lokasi penelitian dikarenakan gunung Bawakaraeng merupakan daerah rawan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penataan Ruang dan memiliki keterikatan secara kultural dengan masyarakat Sulawesi Selatan yang juga berfungsi sebagai daerah penyangga kehidupan bagi daerah-daerah disekitarnya.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan (observation), wawancara (deep interview) dan dokumentasi dengan menggunakan Snowball Sampling sebagai metode penentuan informan.

Analisis Data

Sesuai dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi diolah dengan cara penggolongan, pengkategorian dan pengklasifikasian data. Data diolah melalui reduksi data maka hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan strategi analisis studi kasus dengan berdasarkan pada proposisi teoritis atau hipotesis (Yin, 2006). Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik penjodohan pola yang merupakan merupakan suatu teknik analisis yang membandingkan suatu pola dengan berdasar pada hasil empirik terhadap pola yang diprediksi sebelumnya, ataukah dengan informasi kasus yang sama dikaitkan dengan beberapa preposisi teoritis. Temuan berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan data sekunder akan dapat menunjukkan dimensi-dimensi adaptive governance dalam strategi mitigasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan teknik pembuatan penjelasan yang bertujuan menganalisa data studi kasus yang diperoleh dengan cara membuat penjelasan

tentang kasus yang didapatkan. Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh, menghasilkan suatu kesimpulan dari stakeholder dalam strategi mitigasi.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa stakeholders dalam perlindungan sumber daya alam di gunung Bawakaraeng terbagi atas sektor sipil, sektor privat dan sektor publik. Terdapat beberapa stakeholders yang masuk kedalam kategori sipil yaitu: Non Government Organisation, masyarakat di sekitar kaki gunung yang memanfaatkan lereng gunung untuk aktivitas pencarian nafkah, masyarakat yang melakukan aktifitas wisata alam dan kegiatan spiritual di gunung Bawakaraeng baik perseorangan ataupun kelompok dan aktivitas ilmiah yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok

Sektor privat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki aktifitas produksi yang mengeksploitasi sumber daya alam di gunung Bawakaraeng sehingga keberadaanya bersentuhan langsung dengan kerentanan lokasi rawan bencana yang mana kondisi kerentanan tersebut merupakan faktor kunci dalam penanggulangan bencana.

Sektor publik yang dipandang sebagai institusi pembuat kebijakan merupakan instansi pemerintah yang areal kerjanya terkait dengan mitigasi bencana di gunung Bawakaraeng dan eksplorasi terhadap sumber daya alam pada gunung Bawakaraeng yaitu; Kecamatan Tinggi Moncong, Balai Konservasi Hutan dan Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulsel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Gowa

Dalam dimensi vertikal, keberadaan stakeholder dipandang sebagai kesatuan organisasi dan dilihat dari seberapa besar ruang lingkup dan jaringan kerja organisasi tersebut. Dimensi ini melihat stakeholdernya berdasarkan level organisasi, apakah organisasi tersebut bersifat lokal, regional, nasional ataukah internasional. Hasil penelitian teridentifikasi stakeholder dalam dimensi ini yaitu; Lokal (Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, NGO), Regional (BPBD Kabupaten Gowa, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas

Pertambangan dan Energi dan Walhi), Nasional (BPBD Provinsi Sulawesi Selatan) dan Internasional,

Motif dan isu stakeholders adalah; Pertama, sektor sipil dengan motif Ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, pemanfaatan SDA, nilai historis, adat dan kebudayaan, pendidikan dan spiritual dengan isu yang terbangun antara lain; mata pencaharian turun temurun, lahan adat, global warming, kesenjangan pendapatan, warisan adat dan budaya; Kedua, sektor privat dengan motif profit, ketenagakerjaan dan tuntutan Undang-Undang dengan isu strategis perluasan areal agrowisata, penambahan jumlah wisatawan, pembangunan infrastruktur pariwisata, peningkatan produksi teh, penyerapan ratusan tenaga kerja lokal, eksplorasi potensi pertambangan dan penyediaan material pembangunan; Ketiga, sektor publik dengan motif penanggulangan bencana, peningkatan APBD, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi daerah, penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pembenahan sistem hukum dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi dibalik stakeholder yang mempengaruhi kapasitas leading sector untuk memasukkan isu-isu baru dan berubah menjadi kegiatan sebagai tindakan kolektif, apakah bersifat ekologi, ekonomi, sosial budaya atau perkembangan aksi kolektif berbeda dalam situasi yang berbeda. Banyak literatur tentang aksi kolektif juga telah mengakui pentingnya upaya bersama oleh pengusaha kebijakan, fasilitator dan pemimpin dalam memfasilitasi perubahan kelembagaan. Dengan demikian, perlu untuk menganalisis motivasi dari para stakeholders dan leading sector untuk terlibat dalam mitigasi bencana dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kapasitas adaptasi dari inisiatif. Kapasitas adaptif dari inisiatif mitigasi bencana ditingkatkan jika program kegiatan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai kemitraan. Hal ini lebih diperkuat jika proses didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, peningkatan kapasitas, dan produksi pengetahuan untuk memperkuat mitra dan kemitraan.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana melalui pasal tentang asas dan prinsip penanggulangan bencana menekankan pada koordinasi dan kerjasama lintas stakeholders dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Struktur dan jaringan yang mendukung koordinasi dan kerjasama seluruh dimensi horisontal dan vertikal dari dimensi adaptive governance. Dalam konteks mitigasi bencana, struktur mengacu proses pengambilan keputusan dan jaringan yang bertujuan untuk pemecahan masalah dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, konsep ini berfokus pada proses partisipasi dan deliberatif dalam membangun konsensus dengan tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, platform atau forum untuk pemerintahan adaptif sangat penting untuk memungkinkan proses pelaksanaan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Platform tersebut dapat memfasilitasi strategi utama dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan kegiatan oleh perwakilan dari berbagai sektor masyarakat (publik, swasta, dan masyarakat sipil) yang mewakili kebutuhan dan kepentingan stakeholder pada tingkat yang berbeda. Koordinasi ini juga dapat ditingkatkan dengan pengembangan pembelajaran sosial yang men-transfer pengetahuan dan pendekatan baru dalam kolaborasi antara leading sector dan stakeholder lainnya pada tingkat yang berbeda. Dalam sistem adaptif kompleks, ini juga mendorong dialog antara sektor dan produksi pengetahuan baru. Sejauh mana inisiatif leading sector dapat membangun platform atau forum untuk koordinasi kegiatan manajemen juga dapat memberikan indikasi tingkat kapasitas adaptasi mereka.

Dalam pendekatan struktur, penempatan sektor sipil dalam ranah konsultasi berdampak pada lemahnya kekuatan stakeholder tipe ini dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dikarenakan aksesnya yang terbatas pada alur pengambilan keputusan terlebih lagi pemilahan tingkat kapasitas dan beragamnya isu dalam sektor sipil secara langsung membatasi kemungkinan adanya produksi pengetahuan baru. Hal tersebut tampak dari lemahnya pembacaan leading sector terhadap nilai-nilai perlindungan lingkungan dalam konsep apassang yang sebenarnya telah ada selama ratusan tahun terkandung dalam cultural cognitive masyarakat

Bawakaraeng yang oleh BPBD ditempatkan sebagai objek pendidikan dan kebijakan penanggulangan bencana.

Berbeda halnya dengan sektor sipil, tipe pelibatan sektor privat lebih mengarah pada fungsi koordinasi. Hal ini dikarenakan sektor privat memiliki kepentingan yang secara langsung dapat meningkatkan potensi kerawanan di gunung Bawakaraeng terutama bagi sektor perkebunan, pariwisata dan pertambangan, langkah-langkah koordinasi sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan melekat pada aktifitas ekonomi. Hal ini telah diatur oleh UU no 24 Tahun 2007 pasal 71 yang menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pengawasan aktivitas ekonomi dan eksploitasi yang mampu menimbulkan bencana.

Pelibatan model koordinasi sejatinya menuntut tanggung jawab penuh pada fungsi dan peranan stakeholder dalam platform kerjasama (Susanto, 2006). Oleh karena itu, dalam platform ini, pihak swasta memiliki kewajiban dalam melakukan aktifitasnya berdasarkan alur yang telah ditetapkan bersama, berbeda dengan sektor sipil yang memiliki keterikatan secara sukarela sebagai akibat dari model pelibatan yang bermain dalam ranah konsultasi. Selain dari kewajiban tunduk pada perundang-undangan, pihak privat juga terikat pada standar internasional penjaminan mutu terhadap layanan publik serta prinsip usaha yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam pelibatan jenis koordinasi, Berkes & Folke (2008), menjelaskan bahwa selain berkewajiban dan senantiasa terikat pada platform, model koordinasi juga mendekatkan stakeholders pada akses langsung terhadap pembuatan kebijakan ataupun kekuatan dalam menentukan design program berkelanjutan. Berdasarkan sudut pandang tersebut dan model pelibatan yang berbeda antara sektor privat dan sektor sipil, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam konflik yang mungkin saja terjadi akibat benturan kepentingan, posisi sektor privat akan lebih diuntungkan mengingat sektor ini memiliki motif dan isu yang sama dengan sektor publik serta akses yang lebih dekat dengan proses legislasi dikarenakan hubungan langsungnya dengan SKPD terkait.

Bagian selanjutnya adalah jaringan yang dimaknai sebagai media, bertujuan membentuk arus komunikasi yang dapat diilustrasikan

kedalam beberapa fungsi umum seperti jalan pembuka aktor terhadap pembuatan kebijakan publik, konsultasi, negosiasi dan instrument kerjasama antar aktor baik pada perumusan maupun implementasi suatu kebijakan terutama yang berhubungan dengan common problem seperti penanggulangan bencana (Hidayat, 2014).

Lemahnya pertukaran sumber daya masyarakat ditandai dengan penempatan masyarakat sebagai objek program dan pendidikan mitigasi serta lemahnya pengetahuan pemerintah terhadap isu strategis yang dimiliki oleh masyarakat terutama nilai-nilai ekologi dalam budaya masyarakat Bawakaraeng. Padahal dalam konteks isu strategis tentang lingkungan juga masyarakat lokal memiliki kepentingan ekonomi dan cultural yang hendaknya harus dipahami oleh leading sector sebagai prioritas dalam strategi mitigasi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lokal merupakan pihak yang akan mendapatkan dampak langsung. Dalam hal kekuatan sosial masyarakat untuk mitigasi bencana, local genius and knowledge atau katakanlah kearifan lokal harus diberi ruang dalam proses dialektika kosmologi masyarakat dengan alamnya (Indiyanto, 2012). Proses dialektika ini tidak berada dalam ruang yang kosong melainkan juga dielaborasi salah satunya dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan nantinya akan terejawantah dalam perilaku pemanfaatan alam. Karena melalui proses budaya, diharapkan pemanfaatan tersebut memuat etika relasi yang harmonis antara masyarakat dan lingkungan (Ulum, 2008). Praktik zonasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan merupakan salah satu contoh lemahnya leading sector dalam melihat sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Ketimpangan struktur yang ada secara langsung mempengaruhi pertukaran sumber daya dimana masing-masing sumber daya tidak berhasil didistribusikan secara ideal. Kondisi tersebut juga secara langsung mempengaruhi konsensus dan komitmen masing-masing stakeholders dalam mensinergikan kegiatannya dengan kerangka mitigasi bencana. Ketimpangan pengakomodasian isu yang tidak berimbang dan tampak pada struktur dan jaringan multistakeholder menjadikan BPBD sangat tidak adaptif dalam melihat situasi dilapangan yang tentu saja akan menghasilkan lemahnya proses

mitigasi bencana alam di Gunung Bawakaraeng.

KESIMPULAN DAN SARAN

Motif dan isu stakeholders sangat beragam dan secara langsung mempengaruhi struktur dan jaringan mitigasi bencana. Dalam pendekatan adaptive governance, pihak pemerintah dianggap kurang adaptif dalam menjalankan tugasnya sebagai leading sector karena tidak adanya struktur dan posisi yang berimbang untuk mengakomodasi motif dan isu dari masing-masing stakeholders serta tidak stabilnya pertukaran sumber daya dalam jaringan yang muncul pada platform mitigasi bencana. Adapun saran yang bisa dimunculkan dalam penelitian ini, penulis menekankan bahwa, Pemerintah sebagai leading sector hendaknya memiliki pengetahuan terhadap motif dan isu yang dibangun oleh setiap stakeholders untuk memaksimalkan partisipasi dan peran stakeholders yang selanjutnya menciptakan kerangka kerja yang seimbang agar ada kejelasan antara fungsi dan konsensus yang mengikat pertanggungjawaban bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkes & Folke. (2008). *Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hidayat R. (2014). *Jaringan Kebijakan Pada Proses Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang*, Makassar: (Tesis) Universitas Hasanuddin.
- Indiyanto A. (2012). *Mempertemukan Sains dan Pengetahuan Lokal dalam Respon Masyarakat Lokal atas Bencana*. Bandung: Mizan.
- Musdah E. (2014). *Analisis Mitigasi Nonstruktural Bencana Banjir Luapan Danau Tempe*, Yogyakarta: (Tesis) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Noor J. (2012). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana.
- Nurjanah dkk. (2012), *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta.
- Schwab dkk. (2007) *Hazard Mitigation and Preparedness*, United States: Wiley.
- Susanto. (2006). *Disaster Management di Negeri Rawan Bencana*, Jakarta: Aksara Grafika Pratama.
- Thoha M. (2011). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Ulum. (2008). *Manajemen Bencana dan Governance Mind Set*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yin R. (2006). *Studi Kasus; Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.